

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Yang Terkurung Oleh Pembangunan Mall (Analisis Putusan Nomor 117/Pdt/2016/PT.Mtr)” dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Hak akses jalan bagi tanah yang terkurung; (2) *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 117/Pdt/2016/PT.Mtr.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa, pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk memberikan akses jalan bagi tanah yang terkurung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13, Pasal 31, Pasal 51 PP 40 Tahun 1996, dan Pasal 61 huruf (d) UU 26 Tahun 2007. Sehingga Putusan Nomor 117/Pdt/2016/PT.Mtr tidaklah tepat, karena dengan benar dinyatakan bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dari HGB milik PT.Sriwijaya Propindo Utama, maka disamping memiliki kewenangan membuat pagar tembok tersebut, PT. Sriwijaya juga memiliki kewajiban untuk memberikan akses jalan terhadap tanah yang terkurung, dengan demikian pembangunan pagar tembok tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum meskipun dibangun di atas tanah HGB milik PT. Sriwijaya Propindo Utama.

Kata Kunci: Fungsi Sosial, Hak Atas Tanah, Tanah Terkurung.

ABSTRACT

This thesis is entitled “Social Function of Land Title Which is Isolated by Mall Development (Analysis of Decision Number 117/Pdt/2016/ PT.Mtr)”, with 2 (two) principal issues : (1) the access road right for the isolated land; (2) Ratio Decidendi Number 117/Pdt/2016/PT.Mtr .

This research is a type of legal research using normative legal research methods. In addition, this study also uses statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The results of this thesis research indicate that the holder of the land title have an obligation to provide access road for the isolated land as stipulated in articles 13, article 31, article 51 of PP 40 of 2016 and article 61 letter (d) Constitution Number 26 year 2007. So the Verdict number 117/Pdt/2016/PT.Mtr is incorrect for it is properly stated that the disputed lands are a unity of HGB (Building Right Title) owned by PT. Sriwijaya Propindo Utama. So besides having authority to make the fence of the wall PT. Sriwijaya Propindo Utama also has an obligation to provide access road for the isolated land, thus the construction of the fence wall is a violation of the law eventhough it is built on land with HGB (Land Right Title) owned by PT. Sriwijaya propindo Utama.

Key Words: Social Functions, Land Title, Isolated Land.